

ABSTRAK

Berbagai kritikan dari masyarakat muncul karena Kejaksaan dianggap kurang mampu mengakomodir peran pengawasan tersebut dan mengidentifikasi berkembangnya berbagai aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang dan mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama di Indonesia yang berujung pada kasus-kasus penodaan agama.

Penelitian ini tentang “Fungsi Kejaksaan di Bidang Intelijen Yustisial Dalam Pengawasan Terhadap Aliran Kepercayaan dan Keagamaan”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan berdampak positif dan bagaimana seharusnya fungsi Kejaksaan di bidang intelijen dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan.. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Penelitian menyimpulkan bahwa dampak fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen Yustisial dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan yaitu pelarangan terhadap ajaran tertentu berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak lain seperti hak ekonomi sosial dan budaya, yang seharusnya tetap menjadi hak para penganut walaupun dinyatakan dilarang. Hak yang juga sering diabaikan akibat dari rekomendasi Tim Pakem adalah hak untuk hidup secara aman dan memperoleh perlindungan dari segala tindakan yang mengancam. Kekerasan sering dialami oleh kelompok atau aliran yang telah ‘disedatkan’ dan negara seakan tak berdaya dalam mencegah terjadinya kekerasan. Fungsi Kejaksaan di Bidang Intelijen Pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (Pakem) yang seharusnya melalui upaya dan pendekatan sebagai berikut: Tidak melibatkan militer dalam Pakem, rekomendasi yang dikeluarkan Tim Pakem tidak harus ditindaklanjuti dengan tindakan represif, perlu adanya ukuran yang jelas dan tegas tentang indikator yang dipergunakan oleh Tim Pakem dalam memutuskan untuk melakukan pengawasan. Selain itu diperlukan metode untuk menilai sebuah ajaran agama, Tim Pakem perlu didukung dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap elemen yang ada dalam Internal Tim Pakem dalam mengambil suatu tindakan. Dengan adanya SOP ini, maka kebijakan terkait dengan berjalannya Tim Pakem dapat dilakukan secara independen tan[a tergantung pada aktor-aktor dalam Tim Pakem. Sehingga potensi penyalahgunaan dan timbulnya kesewenang-wenangan dapat diminimalisir. Selain itu dengan adanya SOP Tim Pakem bekerja independen tidak terpengaruh alat kepentingan kelompok tertentu, kejaksaan harus lebih intensif membuka diri terhadap kemitraan dengan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat dalam memberikan informasi aliran kepercayaan yang ada dalam masyarakat sehingga diperoleh bank data yang cukup untuk melaksanakan berbagai tindakan dalam pengawasan aliran kepercayaan, Kemampuan personil yang professional, pembatasan aliran kepercayaan tidak mencakup hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam pengertian *freedom to be*.

Kata Kunci : Kejaksaan, Aliran Kepercayaan, Keagamaan.

ABSTRACT

Various criticisms of society arise because the Prosecutor considered less able to accommodate a supervisory role and identify the development of various faiths are considered deviant and prevent abuse and / or blasphemy in Indonesia that led to cases of blasphemy.

This study on "Functions in the Field Intelligence Judicial Attorney In Control of Beliefs and Religions". The problem in this study is whether the functions of the Prosecutor in the field of intelligence in the judicial oversight of religious faiths and the positive impact and how it should function in the field of intelligence Prosecutor in the supervision of cult and religious .. The approach is sociological jurisdiction. Collecting data through interviews, literature study and documentation study.

The study concludes that the impact the function of the Prosecutor in the field of judicial Intelligence in the supervision of religious faiths and that a ban on certain teachings implications for the fulfillment of other rights such as social economic and cultural rights, which should remain the property of the adherents although otherwise prohibited. Rights are also often overlooked as a result of recommendations Pakem Tim is the right to live safely and be protected from any actions that threaten. Violence often experienced by groups or streams that have been 'misled' and the country seemed helpless in preventing violence. Function Attorney in the Field Intelligence Surveillance on Beliefs and Religions (Pakem) should be through the efforts and approaches as follows: Do not involve the military in Pakem, recommendations issued Tim Pakem should not be followed up with repressive measures, the need for the size of the clear and unequivocal on indicators used by Tim Pakem in deciding to conduct surveillance. Serlain it required a method for assessing a religious teachings, Tim Pakem needs to be supported by the Standard Operating Procedure (SOP) which can be used as guidelines for each element in the Internal Team Pakem in taking action. Given this SOP, then the policies associated with the passing of Tim Pakem can be done independently tan [a dependent on actors in Pakem Team. The potential for abuse and the onset of arbitrariness can be minimized. In addition to the SOP Team Pakem independent work is not affected appliance certain interest groups, the prosecutor should be more intensive open themselves to a partnership with the community to empower the community in providing the information flow of confidence in the society in order to obtain bank sufficient data to carry out various actions in oversight cult, ability of professional personnel, restrictions on the flow of trust does not include the right to religious freedom in the sense of freedom to be.

Keywords: Attorney, Beliefs, Religious